

Kebijakan Negara Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Community Engagement

Haya Zabidi

Mahasiswa S3 UII Dalwa Jawa Timur

Email: abishofia155@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap kebijakan dalam sektor pendidikan untuk mencerdaskan, membawa kehidupan bangsa yang maju, berdaya saing tinggi, berkualitas. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintah semata, karena hal itu juga tergantung dari berbagai komponen-komponen pendidikan lainnya dalam memajukan dunia Pendidikan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada metode deskriptif kualitatif tujuannya agar mampu mendapatkan data yang lebih akurat mengenai sistem kebijakan negara dalam sektor pendidikan untuk menghadapi era disrupsi yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan begitu banyaknya inovasi dan kreatif yang memang sangat dituntut di era disrupsi tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat di dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan keagamaan dapat disusun sebagai berikut; Pertama, peningkatan dalam pengembangan manajemen lebih *accountable*. Kedua, peningkatan dalam pengembangan manajemen organisasi pendidikan yang berkualitas. Ketiga, peningkatan peran di masyarakat di dalam mengatur pengelolaan sumber belajar sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang unggul.

Kata Kunci : Kebijakan Negara, Pendidikan, *Community Engagement*

Abstract

The Indonesian state has a great responsibility for policies in the education sector to educate, bring the life of an advanced, highly competitive, quality nation. Therefore, in an effort to improve the quality of education is not only the responsibility and policy of the government, because it also depends on various other components of education in advancing the world of education. This research uses qualitative methods, namely by reviewing studies of state policies in the Education sector by looking at *Community Engagement*. This research focuses more on qualitative descriptive methods in order to be able to obtain more accurate data on the state policy system in the education sector to face the era of disruption, namely increasingly sophisticated technological developments and so many innovations and creativity that are highly demanded in the era of disruption. The results showed that community participation in empowering and improving religious education can be arranged as follows; First, improvements in the development of more *accountable management*. Secondly, improvement in the development of quality management of educational organizations. Third, increasing the role in the community in regulating the management of learning resources so as to produce a superior education system.

PENDAHULUAN

Pentingnya mencapai masyarakat yang berkeadaban dan berkebudayaan tinggi sebagai tujuan nasional hanya dapat terwujud melalui pendidikan yang komprehensif dan berkarakter sesuai dengan identitas bangsa. Pendidikan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi emas bangsa untuk menghadapi tantangan globalisasi yang cepat. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi secara global menjadi kunci dalam merespons tantangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan yang matang untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang menjadi penerus kemajuan bangsa.

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik menjadi landasan bagi peserta didik untuk mencapai pendidikan yang bermakna. Peran guru menjadi krusial dalam mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045 yang berkualitas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Tenaga pendidik perlu memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna serta berkontribusi pada perkembangan pengetahuan peserta didik.

Meskipun Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan new normal yang berdampak pada sektor pendidikan, bangsa Indonesia menantikan kebijakan pendidikan yang dapat mencerdaskan, membawa peradaban yang tinggi, berdaya saing, berkualitas, dan maju. Namun, sayangnya, kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis dan terkadang terkendala oleh sekelompok orang yang menjadi pemangku kebijakan. Realitasnya menunjukkan bahwa kebijakan sektor pendidikan seringkali diarahkan oleh kepentingan golongan penguasa dan kepentingan politik mereka.

Pada akhirnya, perkembangan pendidikan terhambat oleh kebijakan-kebijakan yang tidak produktif sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas bangsa. Namun, penting untuk diingat bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tanggung jawabnya tidak hanya terletak pada pemerintah dan kebijakan mereka saja. Hal ini juga bergantung pada berbagai komponen pendidikan lainnya yang berperan dalam kemajuan dunia pendidikan.¹

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2016 hingga September 2021, terdapat 240 kasus korupsi yang melibatkan sebanyak 621 tersangka di sektor pendidikan yang ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Mayoritas tersangka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan 288 ASN atau 46,3% dari jumlah tersebut. Sebagian besar ASN yang terlibat adalah staf di Dinas Pendidikan, dengan 160 tersangka, sedangkan sisanya berasal dari instansi lain seperti Kementerian dan Dinas terkait. Selain itu, terdapat 44 kepala Dinas Pendidikan yang menjadi tersangka. Di tingkat sekolah, terdapat 157 tersangka korupsi, di mana kepala dan wakil kepala sekolah merupakan yang terbanyak dengan 91 tersangka. Kemudian, terdapat juga kasus yang melibatkan guru, kepala tata usaha, penanggung jawab teknis kegiatan, serta staf keuangan atau bendahara sekolah.²

Mengacu pada data di atas, terlihat bahwa masalah-masalah dalam sektor pendidikan di Indonesia mencakup beberapa aspek. Pertama, alokasi anggaran dalam bidang pendidikan belum optimal, yang dapat berdampak pada ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendidikan. Kedua, kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan masih rendah, yang mungkin terkait dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi tenaga pendidik. Ketiga, korupsi sering kali menjadi permasalahan

¹ Soedijarto, *Landasandan Arah Pendidikan Nasional Kita*. (Jakarta: Kompas, 2008). Hal. 18

² Lihat Berita berjudul *ICW: Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Didominasi oleh ASN* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-tersangka-korupsi-sektor-pendidikan-didominasi-oleh-asn> diakses 22 Januari 2024

yang melanda sektor pendidikan, yang dapat mengganggu penggunaan anggaran dengan efisien dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi terhadap kebijakan negara di sektor pendidikan dengan pendekatan Community Engagement. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kebijakan negara dalam sektor pendidikan dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan partisipasi suatu organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan masyarakat, terutama dalam menghadapi era disrupsi yang menjadi tantangan bagi negara dan organisasi, namun juga menjadi peluang.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pembelajaran dapat membentuk karakter pendidikan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah pada metode deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai sistem kebijakan negara di sektor pendidikan dalam menghadapi era disrupsi, di mana teknologi berkembang pesat dan inovasi serta kreativitas sangat diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Negara

Secara umum, sebuah kebijakan melalui siklus hidup kebijakan yang mencakup beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan, dan kembali pada perumusan masalah.

Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kebijakan. Carl Friedrich, misalnya, mendefinisikan kebijakan sebagai "arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu";³

Menurut Richard Rose, kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang memiliki hubungan satu sama lain serta konsekuensinya bagi pihak yang terlibat, bukan sekadar keputusan yang berdiri sendiri.⁴ Robert Eyestone memberikan definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah interaksi antara sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya.⁵ Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan.⁶

James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud, yang ditetapkan oleh satu individu atau beberapa aktor untuk menangani suatu masalah.⁷ Sedangkan Amir Santoso mengelompokkan pandangan para ahli ke dalam dua kategori: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik; kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang memiliki tujuan dan maksud tertentu serta dampak yang dapat diprediksi.⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu untuk mengatasi masalah. Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah

³ Carl Friedrich, *Man and His Government*. (New York: McGraw Hill, 1963).

⁴ Richard Rose, *The Power Elite*. (New York: Oxford University Press, 1969).

⁵ Robert Eyestone, *Benang Kebijakan; Kajian Kepemimpinan Kebijakan*. (Indianapolis: Bobbs-Merrill. Fakry Gaffar, 1990).

⁶ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, N.J Printice-Hall 2nd ed, Englewood Cliff, 1975.

⁷ James E Anderson, *Pembuatan Kebijakan Publik: Suatu Pengantar* Edisi Kelima, (Boston: Perusahaan Houghton Mifflin, 2003)

⁸ Amir Santoso, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1998).

dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan tindakan atau perilaku dari badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan memastikan kepatuhan dari kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Akibatnya, implementasi kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

B. Sektor Pendidikan

Sedangkan kebijakan di sektor pendidikan berdasarkan ensiklopedia menyebutkan *“kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut”*.⁹ Prioritas utama pada kebijakan pendidikan dalam era globalisasi adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan dan eksistensi negara dalam persaingan global. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai-nilai demokrasi, dan demokrasi yang berhasil tercapai didukung oleh pendidikan¹⁰

Oleh karena itu, penulis memandang kebijakan pendidikan sebagai bagian integral dari kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan pembangunan. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di sektor pendidikan sebagai bagian dari tujuan pembangunan keseluruhan negara. Secara teoritis, pembentukan kebijakan pendidikan didasarkan pada landasan pemikiran ilmiah empiris, dengan berbagai pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para pembuat kebijakan sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.¹¹

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan meliputi:

1. Penjabaran visi dan misi pendidikan dalam masyarakat.
2. Dasar dari ilmu pendidikan sebagai praktik yang melibatkan analisis, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
3. Validitas kebijakan untuk perkembangan individu dan masyarakat.
4. Keterbukaan terhadap masukan dari masyarakat dalam seluruh proses kebijakan.
5. Dukungan kebijakan oleh riset dan pengembangan untuk implementasi yang efektif.
6. Analisis kebijakan sebagai langkah penting dalam perumusan kebijakan.
7. Fokus pada kebutuhan peserta didik untuk membentuk intelektual organik.
8. Pendorong terbentuknya masyarakat demokratis melalui pendidikan.
9. Hubungan kebijakan dengan misi dan tujuan pendidikan.
10. Berbasis efisiensi dalam implementasi kebijakan.
11. Pusatkan pada kebutuhan peserta didik, bukan pada kekuasaan.
12. Dasar pada keputusan rasional dan efektif, bukan pada kebijakan intuitif.
13. Klarifikasi tujuan untuk kebijakan yang tepat dan jelas arahnya, menghormati kebebasan peserta didik..¹²

⁹RiantNugroho. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. ElexMediaKomputindo. 2008). Hal. 36

¹⁰RiantNugroho. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. ElexMediaKomputindo. 2008). Hal. 36

¹¹ Arif Rohman. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama. 2009). Hal. 114

¹² Lihat tulisan Tilaar, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008). dan Tilaar, H.A.R dan RiantNugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008). Hal. 141-153

Kebijakan pendidikan difokuskan pada memenuhi kebutuhan peserta didik daripada memuaskan birokrat. Tujuan utama dari semua kebijakan pendidikan adalah memberikan manfaat dan kemerdekaan kepada peserta didik. Sedangkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

1. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional agar diakui secara sah dan resmi.
3. Kebijakan pendidikan harus memiliki konsep operasional agar dapat diimplementasikan.
4. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang berwenang.
5. Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi untuk diperbaiki jika mengandung kesalahan.
6. Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas dan bersepadu dengan kebijakan lainnya.¹³

C. Community engagement dalam pandangan Islam

Keterlibatan aktif peran masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam bentuk peningkatan kapasitas serta komitmen bersama turut menempati posisi krusial dalam pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna meningkatkan mutu pendidikan pada instansi yang bersangkutan. Program MBS yang didukung kontribusi seluruh komponen warga sekolah sangatlah diperlukan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁴

Peran masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa “*masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*”.

Fenomena ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya konsep usaha pengembangan potensi lokal yang dimiliki guna mempersiapkan dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Birokrasi otonomi pendidikan bertekad guna mengisyaratkan momentum peluang besar kepada sekolah untuk mampu berdaya dalam berkembang secara maksimal tanpa harus menghilangkan identitas. Konsep otonomi pendidikan yang digagas dikemas dalam program yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berangkat pada tekad pengembangan potensi lokal masing-masing wilayah sekolah, yang kemudian dengan penerapan konsep MBS di setiap sekolah hal ini sejalan berbanding lurus. Esensi MBS berpondasi pada otonomi sekolah yang diberikan serta partisipasi Masyarakat.¹⁵

Realita yang terjadi di lapangan ditemukan kondisi paradoks. Partisipasi masyarakat yang pada hakikatnya berperan agung acap kali ditemukan keterbatasan dalam keterlibatan penyelenggaraan pendidikan. “Keterlibatan untuk turut serta “*uduk Bersama*” dalam merumuskan dan menyusun serentak mulai dari perencanaan hingga evaluasi program MBS secara bersinergi kolaborasi tergolong belum mencapai titik maksimal, yang selama ini hanya sebatas berperan dalam berkontribusi sebagai audien

¹³ Ali Imron, *Pembinaan Gurud Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Jaya 1995). Hal. 20

¹⁴ Quaicoe, J. S., Ogunyemi, A. A., & Bauters, M. L. (2023). School Based Digital Innovation Challenges and Way Forward Conversations about Digital Transformation in Education. *Education Sciences*, 13(4), 344. <https://doi.org/10.3390/educsci13040344>

¹⁵ Hakim, L. (2021). *Analisis Internal Dan Eksternal Pendidikan Islam Menuju Globalisasi Pendidikan*. In *Proceedings of Annual Conference on Islamic Educational Management* (pp. 549-567).

dalam beberapa event sekolah tanpa turut terlibat dalam perancangan penyelenggaraan hingga evaluasi kegiatan, serta beberapa hal yang masih bersifat formal.

Fenomena yang melahirkan kondisi demikian diindikasikan karena anggapan yang berkembang mengenai tanggung jawab hal yang berkaitan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah.¹⁶ Sementara itu peran guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat hanya sebatas input pendukung yang memiliki minim kuasa. Anggapan ini diperlukan perbaikan guna mengembalikan konsep MBS dengan melekatkan hubungan antara warga dengan sekolah. Hal ini berpondasi pada esensi otonomi dan partisipasi aktif warga sekolah yang dalam hal ini ialah masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.

Kontribusi masyarakat dan sinergi yang terjalin dengan baik sebagai bentuk implementasi konsep MBS secara utuh tentu akan melahirkan lingkungan pendidikan yang mendukung dalam pencapaian tujuan.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menghadirkan partisipasi dari masyarakat dan sekolah dengan cara melalui pertemuan komite terjadwal tiga sampai empat bulan sekali, melakukan sosialisasi kebutuhan peserta didik baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti WhatsApp, dan mengundang para masyarakat untuk hadir dalam rangka penyelenggaraan suatu acara gelar karya untuk melihat secara langsung karya dan keterampilan dari peserta didik. Sekolah telah memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya MBS dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemahaman yang sama perihal visi sekolah membantu dalam menciptakan konsistensi dalam tujuan pendidikan.

Disamping itu, peran masyarakat dalam memberikan dukungan nyata tercermin pada pelaksanaan program-program pendidikan. Kontribusi mereka dalam membantu penyediaan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti peralatan, buku, atau fasilitas yang mendukung pembelajaran.¹⁷ Selain itu, mereka memberikan dukungan moral kepada peserta didik dan guru, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung. Hal ini tampak pada kontribusi masyarakat dalam mengikuti persembahan karya peserta didik.

Begitu pula dengan kerja sama dengan perusahaan lokal untuk program magang yang telah termuat dalam kurikulum program magang dunia industri dan penyaluran tenaga kerja dalam bentuk program *link and match* telah membantu peserta didik memperoleh pengalaman kerja nyata.¹⁸ Bukti ini tampak pada permintaan pihak mitra baik dari sektor akomodasi, instansi pemerintah maupun swasta terhadap sekolah perihal kebutuhan peran peserta didik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dengan bekal kompetensi yang ditempa dari sekolah. Sekolah juga bermitra dengan organisasi non pemerintah seperti komunitas desain guna mengembangkan keterampilan dan relasi terkait identifikasi pasar, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan positif di masyarakat.¹⁹

Akhirnya Masyarakat harus aktif terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi program-program sekolah. Keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat memberikan

¹⁶ Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah*. Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 9(1), 182-207

¹⁷ Wahyuningsih, A., Widiawati, H., & Zulva, N. (2021). *Upaya Bimbingan Belajar Orang Tua Siswa pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu, 5(6), 5640–56470. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1697>

¹⁸ Azman, A., Simatupang, W., Karudin, A., & Dakhi, O. (2020). *Link and match policy in vocational education to address the problem of unemployment*. International journal of multisience, 1(07), 76-85.

¹⁹ Pangestu, B., Parwata, I. G. L. A., & Wijaya, M. A. (2021). *Minat dan Motivasi Berprestasi Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Bolavoli*. Indonesian Journal of Sport & Tourism, 3(2), 63-70. <https://doi.org/10.23887/ijst.v3i2.31937>

masukannya yang berharga dan saran sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan. Hal ini membantu sekolah dalam mengevaluasi efektivitas program-program yang diimplementasikan dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.²⁰ Keterlibatan orang tua dan masyarakat telah membantu sekolah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Dukungan orang tua dan masyarakat dalam mengumpulkan sumber daya tambahan dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi dalam kegiatan ekstrakurikuler telah membantu dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ketercapaian dari implementasi MBS menduduki peran krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan.²¹

Begitu pula dalam pandangan Islam sendiri bahwa peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan pendidikan Islam yaitu:

1. Revitalisasi pendidikan keislaman di keluarga adalah bagian penting dari tanggung jawab anggota masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Surah Luqman. Peran keluarga sebagai madrasah pertama harus diperkuat.
2. Masjid, musholla, dan lembaga non-formal lainnya bisa dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran keislaman dalam masyarakat. Tradisi belajar agama di masjid perlu dipertahankan meski pengaruh teknologi meningkat.
3. Partisipasi aktif dalam komite madrasah/sekolah juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, sesuai dengan UU Sisdiknas.
4. Masyarakat bisa mendukung program pendidikan agama di madrasah/sekolah dengan mendorong kebijakan seperti jam pelajaran agama tambahan dan berbusana muslim di sekolah umum, serta mendukung program ekstra seperti pengamalan ibadah dan bimbingan baca Quran.

Mendirikan lembaga pendidikan agama yang berfokus pada mutu menjadi perhatian para pengamat pendidikan Islam. Hal ini merupakan upaya konkret partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga nonformal berbasis mutu keislaman.

KESIMPULAN

Secara ringkas, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan keagamaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, termasuk pengembangan manajemen yang lebih akuntabel dan efisien dalam pendanaan serta organisasi pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.
2. Peningkatan peran dalam pengembangan manajemen organisasi pendidikan yang berkualitas dan unggul, untuk menjadikan perkembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat keunggulan yang menghasilkan pendidik dengan pengetahuan umum dan keagamaan yang komprehensif.
3. Peningkatan peran dalam mengatur pengelolaan sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga sistem pendidikan keislaman tidak terpisah dari masyarakat Muslim secara keseluruhan, dan membuat lulusan lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas, mampu, fungsional, dan terintegrasi dengan masyarakat.

²⁰ Yaswinda, Y., & Erlina, B. (2022). *Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Peran Orang Tua Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Pengembangan Diri Anak Di TK An-Nadzir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2523-2534.

²¹ Mustari, M. (2022). *Administrasi dan manajemen pendidikan sekolah*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, (2003) *Pembuatan Kebijakan Publik: Suatu Pengantar* Edisi Kelima, Boston: Perusahaan Houghton Mifflin.
- Azman, A., Simatupang, W., Karudin, A., & Dakhi, O. (2020). *Link and match policy in vocational education to address the problem of unemployment*. International journal of multi science, 1(07), 76-85.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19. Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Eyestone, Robert. (1971) *Benang Kebijakan; Kajian Kepemimpinan Kebijakan*. Indianapolis: Bobbs-Merril. Fakry Gaffar.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill
- Freire, Paulo. 2008. *Pedagogi Kaum Tertindas*. Diterjemahkan oleh F. Danuwita dalam: *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hakim, L. (2021). *Analisis Internal Dan Eksternal Pendidikan Islam Menuju Globalisasi Pendidikan*. In Proceedings of Annual Conference on Islamic Educational Management (pp. 549-567).
- Imron. Ali, 1995. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mustari, M. (2022). *Administrasi dan manajemen pendidikan sekolah*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pangestu, B., Parwata, I. G. L. A., & Wijaya, M. A. (2021). *Minat dan Motivasi Berprestasi Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Bolavoli*. Indonesian Journal of Sport & Tourism, 3(2), 63-70. <https://doi.org/10.23887/ijst.v3i2.31937>
- Quaicoe, J. S., Ogunyemi, A. A., & Bauters, M. L. (2023). *School Based Digital Innovation Challenges and Way Forward Conversations about Digital Transformation in Education*. Education Sciences, 13(4), 344. <https://doi.org/10.3390/educsci13040344>
- Rohman. Arif, 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.
- Rose, Richard. 1969. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Santoso, Amir. 1998. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Soedijarto, 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas.
- Thomas R Dye, 1975, *Understanding Public Policy*, N.J Printice-Hall 2nd ed, Englewood Cliff.
- Tilaar, H.A.R. 2008. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyuningsih, A., Widiawati, H., & Zulva, N. (2021). *Upaya Bimbingan Belajar Orang Tua Siswa pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu, 5(6), 5640–56470. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1697>
- Yaswinda, Y., & Erlina, B. (2022). *Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Peran Orang Tua Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Pengembangan Diri Anak Di TK An-Nadzir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2523-2534.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah*. Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 9(1), 182-207

Lihat Berita berjudul *ICW: Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Didominasi oleh ASN*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-tersangka-korupsi-sektor-pendidikan-didominasi-oleh-asn>